

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Aceh dan Peningkatan Mutu Guru Pendidikan Agama Islam

Mulyadi M. Ramli

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
e-mail: mulyadimr79@gmail.com

DOI: 10.22373/tadabbur.v3i2.394

Abstract

One of the institutions tasked with helping to improve the quality of education is the Education Quality Assurance Institution (LPMP). The purpose of this study was to identify the role of the Education Quality Assurance Institution in improving the quality of Islamic Religious Education (PAI) teachers. This study uses a qualitative approach, this approach was chosen based on the research objective, namely to describe and analyze the process of improving the quality of PAI teachers in Suka Makmur District carried out by LPMP Aceh. The data collection techniques are interviews, and document studies. The results showed that the role of LPMP Aceh was as an organizer in the development of the education quality assurance system program, as a facilitator in education and training, and as a companion for education and training in improving the competence of PAI teachers. The form of coordination of the PAI Teacher Quality Improvement Program at LPMP Aceh in collaboration with Educational Institutions/Departments by providing technical assistance to the Education Office, and collaboration with KKG/MGMP teacher groups through mentoring in schools. As for the control that Aceh's LPMP faces is less coordinated the recorded retention schedule that Aceh's LPMP itself or outside the LPMP, and the allocation of the recorded funds also constitutes control because it is not in the List of Budget Project DIPA LPMP Aceh.

Keywords: *LPMP, Quality Improvement, PAI Teacher*

A. Pendahuluan

Salah satu lembaga yang diberi tugas untuk membantu peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Aceh adalah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Aceh. LPMP Aceh sekarang ini merupakan restrukturisasi dan refungsionalisasi dari Balai Penataran Guru (BPG) sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/0/2003 tanggal 04 Juli 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 7 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Aceh dan Peningkatan Mutu Guru Pendidikan Agama Islam

Mutu Pendidikan (LPMP) Aceh, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Aceh

Sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 LPMP Aceh merupakan unit pelaksana teknis (UPT) pusat yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, yang mempunyai tugas melakukan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi, berdasarkan kebijakan Nasional. Sedangkan mulai tahun 2020 sudah menjadi Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 2013, LPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.¹

Terkait dengan berbagai persoalan tersebut, kebijakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan pengelolaan mutu pendidikan yang terkait dengan peningkatan mutu guru harus diutamakan. Melalui kegiatan yang dilakukan oleh LPMP Aceh dalam bidang studi PAI diharapkan guru Pendidikan Agama Islam di Aceh bisa meningkatkan kemampuan profesionalitasnya. Melalui wadah LPMP Aceh ini peningkatan mutu guru dapat terwujud sehingga mutu PAI juga menjadi semakin tinggi. Untuk mencapai standar mutu dan profesionalisme guru seperti yang diharapkan, upaya-upaya pembinaan terhadap guru harus dilakukan secara terus-menerus. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa pihak yang terlibat dan mempunyai tugas dalam pembinaan dan peningkatan profesionalisme guru di Indonesia. Setelah bidang pendidikan didesentralisasikan ke pemerintah daerah, maka bersamaan dengan itu pengelolaan guru juga menjadi kewenangan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

profesionalisme guru.² Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Aceh merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Aceh dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.³

Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan untuk guru baik guru mata pelajaran umum maupun guru Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan tanggungjawab satuan pendidikan yang harus didukung oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing serta peran serta masyarakat. Pada level Pemerintah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri serta instansi terkait lainnya. Pada level Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, LPMP dan Kantor Wilayah Kementerian Agama, sedangkan pada level pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama.

Dalam pengangkatan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah kewenangan pemerintah daerah yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pembinaan dan kesejahteraan guru PAI. Meskipun pengelolaan guru sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah (kabupaten/kota), Pemerintah Pusat maupun Provinsi juga masih mempunyai tugas dan fungsi untuk ikut serta melakukan pembinaan guru guna meningkatkan profesionalitas guru. Selama ini posisi guru PAI yang mengajar di sekolah umum (SD, SMP, SMA) tidak jelas kemana mereka harus memposisikan dirinya, dimana Institusi tempat mereka bekerja yaitu Dinas Pendidikan ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sedangkan secara kepegawaian, guru PAI ada di bawah binaan Kementerian Agama (Kemenag).

Oleh karena itu, LPMP Aceh dan Kemendikbud saat ini perlu menggodok ketentuan baru terkait keberadaan guru PAI di sekolah umum supaya Kemendikbud melalui LPMP Aceh dapat mengambil peran yang maksimal dengan berbagai program

² Kebijakan Pengembangan Profesi Guru – Badan PSDMPK-PMP, Jakarta, 2014.

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Aceh dan Peningkatan Mutu Guru Pendidikan Agama Islam

kegiatannya dalam meningkatkan mutu PAI. Dilihat dari posisi guru PAI di sekolah umum tersebut yang berada di bawah dua kementerian itu memang tidak begitu menguntungkan bagi mereka. Mulai dari unsur pembinaan, peningkatan karir, hingga penguatan kompetensi jarang dilibatkan dalam pelatihan dan pendampingan demi meningkatkan mutu pendidikan mereka. Dimana Guru PAI di sekolah umum di bawah binaan Kemenag terlihat kurang diperhatikan dan sedikit kegiatan-kegiatannya dalam peningkatan kompetensi mereka, mungkin Kemenag lebih mengutamakan guru PAI yang mengajar di madrasah yang merupakan guru dibawah binaannya secara langsung dan menganggap guru PAI yang mengajar di sekolah umum di bawah binaan Dinas Pendidikan. Sedangkan Dinas Pendidikan juga jarang melibet guru PAI dalam pelatihan-pelatihan karena dianggap sebagai guru Kemenag.

Keberadaan Guru PAI seperti ini sangat tidak diharapkan oleh semua guru PAI yang bertugas di sekolah umum, karena mereka sangat membutuhkan pembinaan secara maksimal dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan kompetensi dan mutu pendidikan mereka yang semakin hari dituntut kualitas dan aktivitasnya dalam melahirkan pendidikan dan pengajaran yang berbasis kompetensi. Demikian juga halnya dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Kompetensi guru PAI yang dimaksud adalah pengembangan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai guru PAI. Bagi seorang guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan kompetensi yang dapat membantu dan melengkapi aktivitasnya sebagai guru yang profesional.⁴ Guru yang dapat mengantarkan peserta didiknya atau dapat menjadikan orang lain pandai dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotorik.

Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dengan sasaran guru dan tenaga kependidikan lainnya dilaksanakan untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi mereka. Ranah kompetensi guru yang perlu peningkatan secara terus menerus adalah pada sisi perencanaan pembelajaran, penyusunan perangkat pembelajaran, pemilihan metode dan media pembelajaran, dan pemantauan proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang baik diawali dengan perencanaan yang baik. Fungsi perencanaan sangat strategis agar pembelajaran dapat berjalan dengan terstruktur dan komprehensif.

⁴ Ngainun Naim, *Menjadi Guru Inspiratif: Memberdayakan dan Mengubah Jalan Hidup Siswa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 1-4.

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pengamatan di lapangan, diperoleh asumsi awal bahwa LPMP Aceh memiliki peranan dalam peningkatan mutu guru PAI yang mengajar/bertugas di sekolah umum (SD/SMP/SMA) baik dalam meningkatkan *insevice training* terhadap peningkatan mutu guru pada umumnya maupun guru Pendidikan Agama Islam. Dan dalam hal ini, penulis ingin meneliti keberadaan LPMP Aceh dan sejauh mana perannya dalam meningkatkan mutu guru PAI, karena LPMP Aceh mempunyai tugas dan fungsi meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang dapat dilakukan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan, supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan ini dipilih berdasarkan pada tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses peningkatan mutu guru PAI di Kecamatan Suka Makmur yang dilakukan oleh LPMP Provinsi Aceh terkait dengan Peran LPMP dalam meningkatkan mutu guru PAI. Peneliti mengambil lokasi tempat penelitian ini di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Aceh. Lokasi penelitian ditetapkan dengan pertimbangan mampu menjawab masalah penelitian, yaitu peran LPMP Aceh dalam meningkatkan mutu guru PAI di Kecamatan Suka Makmur.

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana suatu data diperoleh. Ada dua jenis sumber data dalam penelitian, yaitu manusia (*human*) dan bukan manusia (*non human*). Manusia merupakan informan penelitian yang penting dalam penelitian kualitatif. Pada penelitian ini pelaku utama sumber data manusia adalah: Kepala Lembaga, Kepala Seksi, Bagian Umum, Bagian Kepegawaian, Widyaiswara dan Guru PAI. Sedangkan sumber data non manusia yaitu berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan renstra, program kerja, undang-undang, peraturan-peraturan, laporan-laporan kegiatan, lembaran internal/surat, file pegawai, data statistik pada LPMP Provinsi Aceh. Juga data-data yang memiliki korelasi dengan konteks pengembangan SDM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam kerangka peningkatan peran LPMP Provinsi Aceh dalam meningkatkan mutu guru PAI. Selain itu juga dilakukan pengamatan mengenai proses pengembangan SDM dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan yang terjadi pada LPMP Provinsi Aceh.

Secara garis besar teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data yang terkumpul diperoleh dari bermacam cara, seperti hasil wawancara, observasi, catatan lapangan, intisari dokumen, foto-foto, dan lain-lain. Data-data ini dipilah-pilah, dikelompokkan sesuai temanya. Analisis terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan sebagaimana yang ditempuh oleh Miles dan Huberman⁵ dalam melakukan analisis penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Aceh merupakan restrukturisasi dan refungsionalisasi dari Balai Penataran Guru sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/0/2003 tanggal 04 Juli 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Aceh, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Aceh.

Sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis Pusat yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, yang mempunyai tugas melakukan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi, berdasarkan kebijakan Nasional. Sedangkan mulai tahun 2020 sudah menjadi Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Pasca Gempa dan Tsunami 26 Desember 2004, Kantor lama yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati Km. 14.5 Aceh Besar, tidak dapat difungsikan lagi sementara dan menempati kantor baru yang berada di Desa Niron jalan Banda Aceh-Medan Km, 12.5 Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar. Lembaga Penjaminan

⁵ Miles, M.B & Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohadi. (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 20.

Mutu Pendidikan (LPMP) Aceh didukung oleh 102 orang, sumber daya manusia yang kompeten dan profesional terdiri dari tenaga struktural 70 orang dan tenaga fungsional 32 orang.

Visi dan Misi LPMP Aceh diuraikan sebagai berikut. Visi yaitu “Terwujudnya satuan pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan, berwawasan global berlandaskan nilai-nilai Islami”. Sedangkan misi yaitu: 1) Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan pada jenjang dasar dan menengah. 2) Memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pendidikan dasar dan menengah yang berwawasan global. 3) Memfasilitasi supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian SNP. 4) Memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan sesuai SNP. 5) Melaksanakan kerjasama dengan stakeholder pendidikan di bidang penjaminan mutu pendidikan, 6) Meningkatkan kompetensi SDM LPMP Aceh dan satuan pendidikan, dan 7) Mengembangkan program-program inovasi yang berwawasan global dan Islami.

2. Peran LPMP Aceh dalam Pengembangan Mutu Guru Pendidikan Agama Islam

Peran LPMP Aceh sebagai organizer dengan program SPMI ini dapat dikatakan belum berpengaruh besar pada peningkatan mutu guru PAI bagi sekolah model maupun sekolah imbas, karena kegiatannya tidak fokus hanya untuk guru PAI saja. Namun, dampak positif penjaminan mutu terhadap sekolah model dan sekolah imbas dapat dirasakan masing-masing guru di sekolahnya, yaitu guru lebih termotivasi dalam melakukan penjaminan mutu secara mandiri serta mendapatkan inovasi dalam mengadopsi instrumen penilaian Evaluasi Diri Sekolah.

Berkaitan dengan program pemetaan mutu pendidikan itu merupakan tugas dari Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi (PMS). Seksi ini dikepalai oleh Bapak T. Makmun Saputra, S.T, MM. Di seksi ini terdapat sepuluh pegawai termasuk kepala seksi. Dari jumlah itu, 9 pegawai adalah S-1 dan 1 berpendidikan S2. Kepala Seksi PMS, mengatakan bahwa program utama seksinya adalah pemetaan mutu pendidikan di Provinsi Aceh dan supervisi pendidikan di Provinsi Aceh. Setiap seksi di LPMP Aceh memiliki tugas masing-masing, sedangkan tugas Seksi PMS adalah membantu Kepala LPMP dalam melaksanakan pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan di Provinsi Aceh berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi (PMS) yaitu, Bapak T. Makmun Saputra, S.T, MM. menjelaskan bahwa: Objek tugas dan fungsi pelaksanaan Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi adalah guru (PAI/Umum), kepala sekolah, pengawas sekolah, dan satuan pendidikan. Output yang dihasilkan ada tiga, yakni (1) laporan pemetaan mutu pendidikan Provinsi Aceh melalui penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), (2) laporan supervisi pendidikan, dan (3) laporan bimbingan teknis (bimtek). Sementara, outcome seksi ini adalah rekomendasi tindak lanjut pemetaan mutu pendidikan Provinsi Aceh dan rekomendasi tindak lanjut supervisi pendidikan Provinsi Aceh.

Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi juga menjelaskan bahwa, terdapat beberapa penunjang bagi pencapaian program kerja seksinya, antara lain adanya perencanaan program, pengorganisasian, evaluasi, dan tindak lanjut. Di samping itu, sumber daya yang profesional juga menjadi penunjang, selain sarana dan prasarana yang lengkap, adanya motivasi pimpinan, dan dukungan semua staf. Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi juga menerapkan pembagian tugas yang lengkap, mengacu pada sistem manajemen ISO, dan melakukan mapping sebelum menyusun program berdasarkan data dari Seksi Program dan Sistem Informasi. Namun, di samping penunjang tersebut, juga terdapat kendala seperti pencocokan jadwal dengan seksi-seksi lain serta dengan kegiatan widyaiswara, terutama Widyaiswara PAI yang menjadi ujung tombak LPMP Aceh dalam melaksanakan supervisi bagi guru PAI untuk meningkatkan mutunya terutama dalam empat standar tersebut.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, disebutkan terdapat delapan standar pendidikan yang merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di Indonesia. Dari delapan standar tersebut, hanya empat standar yang dipetakan oleh Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi. Keempat standar yang menjadi wewenang LPMP tersebut, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 PP Nomor 19 Tahun 2005. Keempatnya adalah standar isi, standar proses, standar pengelolaan, dan standar penilaian pendidikan. Sementara, empat standar lainnya, yakni standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, serta standar pembiayaan tidak menjadi fokus LPMP Aceh karena tidak mempunyai anggaran untuk dapat meningkatkan standar tersebut.⁶

⁶ Wawancara dengan Kepala Seksi PMS, Tanggal 24 Februari 2020.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, program kegiatan LPMP Aceh antar seksi FPMP dan PMS saling mendukung dalam pelaksanaan kegiatannya sebagai organizer yang mengarahkan sekolah pada pengembangan mutu guru terutama bagi guru PAI, baik dalam program diklat guru PAI, program SPMI dalam pendampingan guru PAI, dan supervisi bagi guru PAI yang dilaksanakan oleh LPMP Aceh yang langsung terlibat Widyaiswara PAI dalam kegiatannya.

a. Fasilitator Pendidikan dan Pelatihan dalam Peningkatan Kompetensi Guru PAI

Meningkatkan kompetensi guru PAI di sekolah dapat dilakukan melalui jalur pendidikan dan pelatihan (diklat). Jalur peningkatan kompetensi guru PAI di sekolah melalui *pre service training* dilakukan dengan program pendidikan guru Agama Islam di lembaga-lembaga pendidikan guru atau Lembaga Pendidikan dan Tenaga Pendidikan (LPTK) yang diperuntukkan bagi guru yang belum bekerja. Sedangkan jalur peningkatan kompetensi guru PAI di sekolah adalah melalui *in service training*. Salah satunya adalah program pendidikan dan pelatihan yang diperuntukkan bagi guru-guru yang sudah bekerja dengan penekanan pada pembinaan kompetensi pedagogi dan profesionalisme yang bersifat praktis. Peningkatan kompetensi guru sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu guru dan selanjutnya meningkatkan kualitas dan hasil belajar siswa.

Kepala LPMP Aceh menjelaskan bahwa: Saat ini LPMP sering menugaskan Widyaiswara PAI yang ada di LPMP Aceh untuk menjadi narasumber bagi Guru PAI yang pelatihannya dilaksanakan di daerah-daerah, baik yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota maupun oleh sekolah itu sendiri, karena LPMP Aceh memiliki SDM yang handal bagi PAI yaitu tiga orang Widyaiswara PAI.⁷

b. Pendamping Pendidikan dan Pelatihan dalam Peningkatan Kompetensi Guru PAI

Keberadaan Widyaiswara PAI di LPMP Aceh yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai fasilitator yang selalu mendampingi guru PAI saat pelatihan atau kegiatan KKG/MGMP mempunyai peran yang begitu besar dalam Pengembangan Mutu Guru Pendidikan Agama Islam di Provinsi Aceh pada umumnya dan Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Koordinator Widyaiswara yang mengungkapkan bahwa: Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota atau pihak sekolah juga sering melaksanakan pelatihan di daerahnya

⁷ Wawancara dengan Kepala LPMP Aceh, Tanggal, 22 Februari 2020.

masing-masing dengan mengundang narasumbernya dari LPMP Aceh, kalau peserta pelatihannya itu guru PAI maka LPMP Aceh akan menugaskan Widyaiswara PAI sebagai narasumbernya.⁸

Koordinator widyaiswara juga mengungkapkan bahwa: LPMP Aceh memiliki Widyaiswara yang konsentrasi kelahliannya untuk mata pelajaran umum dan PAI, untuk Widyaiswara PAI ada tiga orang yang selalu menjadi narasumber saat kegiatan pelatihan, baik pelatihan itu yang dilaksanakan dengan program LPMP Aceh maupun kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh sekolah atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.⁹

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu Widyaiswara PAI bahwa: LPMP Aceh sangat besar peranannya dalam meningkatkan mutu guru PAI yang ada di Provinsi Aceh, terutama guru PAI yang ada di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar yang merupakan lokasi beradanya kantor LPMP Aceh. Karenakan sering sekali Widyaiswara PAI melatih/ mendampingi guru PAI dalam kegiatan diklat yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan atau KKG/MGMP yang dilaksanakan oleh sekolah di gugusnya masing-masing.¹⁰

Sesuai dengan hasil wawancara diatas, dapat simpulkan bahwa LPMP Aceh mempunyai peran dalam mendampingi Guru PAI dalam peningkatan kompetensi Guru PAI melalui Pelatihan dan Workshop. Hal ini juga diperkuat berdasarkan hasil obeservasi pada GBPP dan SAP yang telah dibuat oleh widyaiswara PAI dalam berkas Daftar Usulan Penilaian Angka Kreditnya, GBPP dan SAP berisi nama Diklat, mata Diklat, alokasi waktu, deskripsi mata Diklat, tujuan pembelajaran, pokok dan sub pokok pembahasan, indikator keberhasilan, alat bantu/ media, serta metode yang akan digunakan.

Kepala Subbagiaan umum yang pengelola sarana dan prasarana Diklat di LPMP Aceh menjelaskan bahwa: Widyaiswara PAI biasanya mempersiapkan materi modul sebagai bahan ajar dan bahan tanyang untuk disajikan pada peserta. Dan dalam mendukung penyampaian bahan ajar widyaiswara PAI menggunakan media pembelajaran yang telah dipersiapkan semuanya oleh panitia diklat. Media pembelajaran yang digunakan pun beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang terjadi saat diklat berlangsung. Karena semua widyaiswara kan rata-rata menguasai IT, sehingga

⁸ Wawancara dengan Koordinator Widyaiswara, Tanggal 23 Februari

⁹ Wawancara dengan Koordinator Widyaiswara, Tanggal 23 Februari 2020.

¹⁰ Wawancara dengan salah satu Widyaiswara LPMP Aceh, Tanggal 23 Februari 2020.

dalam penggunaannya pun bervariasi dan juga penuh inovasi dari mereka. Selama ini yang saya sering lihat digunakan itu adalah powerpoint. Powerpoint yang mereka buat sendiri dan berisi ringkasan dari materi-materi yang ada. Mereka juga menggunakan laptop, pengeras suara, dan LCD/infokus juga sering memakai flipchart dan media paling konvensional papan tulis. Selain itu juga kertas-kertas warna kadang dipakai, namun tidak setiap diklat dipakai, karena itu sangat tergantung dari durasinya. Tapi yang paling sering ya pasti powerpoint itu. Selain itu kadang video-video juga sering dipakai dalam proses diklat untuk

mengembangkan mutu guru PAI.¹¹ Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Koordinator Widyaiswara yang mengungkapkan bahwa: Kalau bahan ajar yang ada di LPMP itu sebagian besar sudah dibuat oleh Kemdikbud. Misalnya Diklat kurikulum, nah itu dari pusat sudah dibuatkan. Karena kan sudah pasti, kurikulumnya begini, bahan ajarnya begini, sampai powerpointnya pun dibuatkan oleh pusat, Widyaiswara PAI tinggal menyesuaikan saja materinya dengan jumlah jam pembelajaran dalam struktur program diklat yang ada.¹² Hal tersebut didukung oleh hasil observasi, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada bahan ajar yang telah disusun oleh widyaiswara dalam pelatihan guru PAI, memang bahan ajar lebih bersifat pada rangkuman dari modul yang telah disediakan oleh pusat. Modul yang disediakan oleh pusat memang sangat tebal dan tidak memungkinkan untuk dibahas lembar per lembar karena harus disesuaikan dengan jumlah jam tatap muka yang ada dalam struktur program diklat.

Menurut Kasubbag yang pengelola sarpras diklat di LPMP Aceh adalah: LPMP Aceh memiliki tiga Widyaiswara PAI sekaligus menjadi satu-satunya LPMP di Kemdikbud yang memiliki Widyaiswara PAI. Adanya program pelatihan bagi guru PAI yang masuk rangkaian kegiatan pelatihan di LPMP Aceh. Fasilitas sarana dan prasarana seperti ATK, printer, internet, ruang belajar dan ruang makan serta penginapan yang memadai juga merupakan faktor pendukung bagi LPMP Aceh dalam meningkatkan mutu guru PAI disaat mengikuti pelatihan di LPMP Aceh.¹³

Selain itu, lanjutnya: Kalau ada surat undangan dari instansi lain yang mengundang Widyaiswara PAI untuk menjadi pemateri/narasumber bagi guru PAI selalu

¹¹ Wawancara dengan Kepala Subbagian umum selaku pengelola sarana dan prasarana Diklat di LPMP Aceh, Tanggal 24 Februari 2020.

¹² Wawancara dengan Koordinator Widyaiswara, Tanggal 24 Februari

¹³ Hasil Wawancara dengan Kasubbag selaku pengelola sarpras diklat di LPMP, Tanggal 25 Februari 2020.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Aceh dan Peningkatan Mutu Guru Pendidikan Agama Islam

diberikan surat tugasnya agar widyaiswara PAI dapat peningkatan mutu guru PAI di daerah, terutama di sekitar kantor LPMP Aceh.¹⁴

Sama halnya dengan pendapat pengelola diklat, juga mengungkapkan bahwa: keberadaannya sebagai Widyaiswara PAI merupakan pendukung utama bagi LPMP Aceh dalam melaksanakan diklat untuk meningkatkan mutu guru PAI. Salah satu pendukung lainnya juga karena adanya perpustakaan dan internet di lingkungan kantor LPMP Aceh, karena internet kan juga bisa menjadi salah satu fasilitas pendukung bagi guru PAI saat mengikuti diklat, sebagai contoh dengan adanya fasilitas internet, guru PAI dapat mengembangkan wawasan dengan mencari bahan/materi tambahan di internet setelah didapatkan sebelumnya dari widyaiswara dalam proses pembelajaran diklat. dan juga menjadi pendukung dalam peningkatan kompetensi Widyaiswara PAI sendiri agar dapat meningkatkan mutu guru PAI disaat menjadi pemateri.¹⁵

Pernyataan dari narasumber tersebut juga didukung oleh hasil data dokumentasi, berdasarkan hasil dokumentasi diketahui bahwa LPMP Aceh sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang memiliki tiga Widyaiswara PAI. Dan saat penyelenggaraan diklat peralatan seperti ATK, printer, ruang kelas, dan juga internet selalu dapat digunakan oleh widyaiswara maupun peserta diklat. Selain itu surat tugas apabila widyaiswara mendapatkan undangan dari instansi lain selalu disetujui oleh lembaga. Karena dengan semakin banyaknya kesempatan Widyaiswara PAI mengisi kegiatan pelatihan-pelatihan maka semakin banyak guru PAI yang dapat meningkatkan kompetensinya.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa Widyaiswara PAI di LPMP Aceh sudah sangat akrab dengan penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran yang sering digunakan adalah powerpoint dan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta terlebih dahulu sebelum disampaikan dalam diklat sehingga akan lebih mudah dalam mendampingi/membimbing dan mengembangkan mutu guru PAI sebagai peserta diklat. Dan adanya Widyaiswara PAI dan fasilitas seperti ruang kelas, ATK, internet, printer, perpustakaan, dan juga pemberian ijin yang mudah agar widyaiswara dapat mengisi kegiatan pendampingan/pelatihanpelatihan diluar LPMP Aceh merupakan salah satu solusi Widyaiswara PAI dalam meningkatkan mutu guru PAI.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Kasubbag selaku pengelola sarpras diklat di LPMP, Tanggal 25 Februari 2020.

¹⁵ Wawancara dengan salah satu pengelola diklat, Tanggal 25 Februari

3. Program LPMP Aceh Terkait Dengan Kegiatan Peningkatan Mutu Guru Pendidikan Agama Islam

a. Pelatihan Guru PAI

Bapak Kepala LPMP Aceh mengatakan bahwa: Selama kepemimpinannya belum pernah LPMP Aceh membuat pelatihan yang khusus untuk guru PAI, namun masa kepemimpinan sebelumnya pernah di LPMP Aceh melaksanakan pelatihan yang khusus untuk guru PAI yaitu saat pelaksanaan diklat kurikulum 2013. Pada saat ini yang ada pendampingan langsung ke sekolah-sekolah dimana semua guru baik guru umum maupun guru PAI dibimbing langsung oleh Widyaiswara LPMP Aceh disaat melaksanakan program SPMI bagi sekolah model dan sekolah imbas yang merupakan program Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan (FPMP), dan saat melaksanakan program Supervisi Mutu Pendidikan yang merupakan program Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi (PMS).¹⁶

Kepala Seksi FPMP juga mengatakan bahwa: Semenjak diberlakukan Kurikulum 2013, LPMP Aceh pernah melaksanakan pelatihan dalam bentuk bimbingan teknis (bimtek) bagi guru-guru semua mata pelajaran baik tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Dalam Pengembangan Mutu Guru khususnya mata pelajaran PAI, LPMP Aceh sudah melatih 23 Instruktur Provinsi (IP) dan 23 Instruktur Kabupaten/Kota (IK) guru bidang studi PAI mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2018 baik tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dilatih langsung oleh narasumbernya dari Widyaiswara PAI LPMP Aceh, karena LPMP Aceh memiliki tiga orang Widyaiswara PAI. Dan setelah melatih IP dan IK di kantor LPMP Aceh, LPMP Aceh juga melaksanakan kegiatan pelatihan bagi 40 guru PAI seluruh Kabupaten/Kota yang narasumbernya dari IP/IK yang sudah lulus pelatihan dan mendapat sertifikat dari LPMP Aceh.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala LPMP Aceh dan Kasi FPMP, jelaslah bahwa Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Aceh mempunyai program kerjanya melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) dalam upaya peningkatan kompetensi Guru PAI, hal ini sesuai dengan tupoksinya mempunyai tugas melaksanakan

¹⁶ Wawancara dengan Kepala LPMP Aceh, Tanggal, 22 Februari 2020.

¹⁷ Wawancara dengan Kepala Seksi FPMP, Tanggal 23 Februari 2020.

penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2015. Dalam melaksanakan tugas tersebut, salah satu dari fungsi LPMP adalah memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan.

b. Pendampingan Sekolah Model

Program LPMP Aceh yang terkait langsung dengan peningkatan mutu guru PAI adalah memberikan contoh sekolah yang memenuhi standar, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) mengembangkan sekolah model sebagai sebuah pilot proyek dalam bentuk sekolah pendampingan. Dalam pelaksanaannya secara berkala dan berkelanjutan LPMP Aceh membantu setiap guru termasuk guru PAI dalam mengelola pembelajaran di sekolah dan kepala sekolahnya. Pendampingan ini baik secara akademis maupun manajemen, agar sekolah pendampingan itu dapat berkembang secara optimal, sehingga dapat mencapai standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP). Dengan demikian sekolah tersebut akan menjadi contoh bagi sekolah lain dalam mengembangkan pola manajemen untuk mencapai standar nasional pendidikan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Widyaiswara PAI LPMP Aceh yang mengungkapkan bahwa: Dalam mendampingi guru pada sekolah model pendekatan yang dilakukan Widyaiswara PAI dalam setiap proses pendampingan pembelajaran atau pendampingan di sekolah adalah menerapkan pembelajaran orang dewasa. Widyaiswara dituntut untuk dapat membelajarkan dengan menggunakan prinsip dan metode pembelajaran orang dewasa saat melaksanakan pendampingan yang tentunya berbeda dengan pembelajaran pedagogi. Selanjutnya Widyaiswara PAI juga dituntut untuk dapat melakukan komunikasi yang efektif dengan semua guru termasuk guru PAI. Bentuk-bentuk komunikasi yang dilakukan disesuaikan dengan masing-masing karakteristik dari mata pelajaran itu sendiri. misalnya pencapaian dari kompetensi itu bisa dilakukan dengan guru berdiskusi lebih aktif, maka kecenderungannya saya lebih sebagai fasilitator. Dalam artian saya tidak terlalu banyak berbicara.¹⁸

Dia juga mengungkapkan bahwa: Memotivasi semangat yang diberikan juga merupakan bagian dari pengelolaan pendampingan yang harus dimiliki oleh Widyaiswara PAI. Kompetensi ini berkaitan dengan kepentingan untuk memelihara dan

¹⁸ Wawancara dengan salah satu Widyaiswara PAI Tanggal 25 Februari 2020.

meningkatkan semangat terutama bagi guru PAI dalam meningkatkan mutu belajar dan mengajarnya. Untuk meningkatkan mutu guru PAI dalam kegiatan pendampingan pada sekolah model, widyaiswara PAI menggunakan evaluasi pembelajaran. Beberapa bentuk evaluasi pun dapat diterapkan dalam proses penilaian pembelajaran bagi guru yang didampingi. Evaluasi yang dilakukan oleh widyaiswara lebih kepada evaluasi proses, yaitu evaluasi yang dilakukan saat pembelajaran berlangsung.¹⁹

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dalam hal pendekatan dan komunikasi Widyaiswara PAI LPMP Aceh dalam mendampingi Guru PAI saat pelaksanaan pendampingan sekolah model menggunakan proses penggalian pengalaman dari guru selaku orang dewasa terlebih dahulu, baru setelah itu diteruskan kepada diskusi antar guru dan pendamping mengenai pemecahan masalah yang dapat dilakukan serta memberikan motivasi dalam meningkatkan semangat belajar gurunya. Hal ini dimaksudkan agar proses komunikasi pembelajaran tidak cenderung satu arah dan widyaiswara lebih bertindak sebagai fasilitator dalam pendampingan. Serta perlunya evaluasi proses pembelajaran untuk dapat mengukur tingkat ketercapaian hasil pelaksanaan pendampingan bagi setiap guru yang ada di sekolah model termasuk guru PAI demi meningkatkan mutu guru dan tercapai SNP.

4. Bentuk dan Koordinasi Program Peningkatan Mutu Guru Pendidikan Agama Islam di LPMP Aceh

LPMP Aceh adalah Unit Pelaksana Teknis Departemen yang berkedudukan di Provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk Supervisi, Bimbingan, Arahan, Saran, dan Bantuan Teknis kepada satuan Pendidikan Dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan. Oleh karena itu LPMP Aceh harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatannya. Ada beberapa bentuk koordinasi program peningkatan mutu guru PAI yang dilakukan oleh LPMP Aceh adalah dimana sejumlah langkah nyata baik yang dilakukan dengan pemerintah maupun sekolah dalam rangka meningkatkan mutu guru melalui peningkatan peran LPMP Aceh dalam pelatihan, workshop dan pendampingan guru di satuan pendidikan.

¹⁹ Wawancara dengan salah satu Widyaiswara PAI, Tanggal 25 Februari 2020.

a. Kerjasama dengan Lembaga/Dinas Pendidikan

LPMP Provinsi Aceh merupakan perpanjangan tangan Kemdikbud di daerah sebagai pelaksana teknis dari program-program Kemdikbud. Sejumlah Program dan kegiatan telah diletakkan di LPMP Provinsi Aceh berupa pemetaan mutu, fasilitasi peningkatan dan penjaminan mutu, pendampingan satuan Pendidikan baru dapat dilaksanakan apabila adanya kerjasama dengan lembaga lain. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala LPMP Aceh yang menjelaskan bahwa: Dalam melaksanakan pendampingan bagi guru-guru untuk meningkatkan mutu gurunya, meningkatkan mutu pendidikan profesi keguruan, memberikan wawasan tentang paradigma baru model pembelajaran (*scientific approach*), pelatihan guru yang mampu mengintegrasikan, motivator, tutor dan instruktur, LPMP Aceh harus membuat kerjasama dengan Kepala Dinas Pendidikan/ Kankemenag Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan meningkatkan kerjasama dengan stakeholder pendidikan yang ada di Provinsi Aceh merupakan langkah ampuh dalam meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya guru Pendidikan Agama Islam.²⁰

Dari penjelasan Kepala LPMP Aceh tersebut, jelaslah bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh LPMP Aceh itu akan maksimal, efisien, dan multimanfaat jika pelaksanaannya bersinergi dengan Dinas Pendidikan/Kankemenag Provinsi/Kabupaten/Kota, Cabang Dinas Pendidikan, dan Balai pengembangan PAUD-Dikmas Provinsi Aceh. Program-program tersebut di atas tentu harus disinkronkan sehingga tidak tumpang tindih, efisien pendanaan, efektif waktu dan sumber daya, serta dapat memperluas cakupan program dan jumlah sasaran. Sinkronisasi Program dalam bentuk Kemitraan dan kerjasama antar Lembaga/instansi Pendidikan akan mempercepat dan mempermudah implementasi program peningkatan mutu pendidikan baik bagi guru mata pelajaran umum maupun guru PAI. LPMP Provinsi Aceh akan mendampingi Pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Aceh sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

b. Kerjasama dengan Satuan Pendidikan

LPMP Aceh membuat koordinasi dan kerjasama dengan setiap kepala sekolah untuk dapat meningkatkan mutu guru mata pelajaran umum maupun PAI yang sudah mengikuti sertifikasi ataupun yang belum, dengan melakukan pembinaan secara berkelanjutan dengan program kegiatan yang ada di LPMP Aceh. Misalnya dengan cara

²⁰ Wawancara dengan Kepala LPMP Aceh, Tanggal, 22 Februari 2020.

menyediakan forum kajian ilmiah, diskusi dan workshop secara periodik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala LPMP Aceh yang menyatakan Bahwa: Kami membina mereka secara berlanjut. Begitu juga kepala sekolah harus melakukan perubahan bagi seorang guru agama dimana mempunyai kemampuan yang tinggi, disertai dengan keterampilan teknik pembelajaran yang bagus, serta metode pembelajaran yang bervariasi dalam meningkatkan mutu pendidikannya, sehingga anak didik dapat menyerap pembelajaran yang diberikan. Kami dan Kepala Sekolah menyediakan dana terkait pemberian buku bacaan dan pelatihan bagi guru PAI. Selanjutnya Kepala sekolah mengatur suasana kerja, disiplin kerja serta memberikan penghargaan bagi guru yang berprestasi.

Dalam satu semester misalnya, setiap guru wajib PAI membaca satu buku yang terkait dengan bidang keilmuannya. Hasil bacaan tersebut selanjutnya dibawa ke dalam forum diskusi, seminar, dan sebagainya. Untuk itu kepada setiap guru PAI wajib diberikan satu buku tiap semester, atau diberikan dana untuk pembelian buku sesuai dengan bidang ilmu yang diajarkannya. Selain itu setiap guru PAI juga wajib mengadakan pelatihan yang terkait dengan tugasnya, misalnya penelitian tindakan kelas, penelitian kurikulum, penelitian hasil belajar, dan lain sebagainya. Hasil penelitian ini selanjutnya dituangkan dalam makalah ilmiah yang siap dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah dan majalah pendidikan yang ada di LPMP Aceh. Guna mendukung kegiatan ini, maka kepada setiap guru PAI wajib disediakan dana oleh sekolah untuk pengadaan buku, dan waktu untuk membaca, menulis, berdiskusi dan sebagainya. Oleh sebab itu, dalam satu minggu diberikan satu hari untuk tidak mengajar, melainkan untuk meningkatkan profesi keguruannya.

c. Kerjasama dengan Kelompok Guru

LPMP Aceh juga berkoordinasi dengan berbagai ketua KKG dan MGMP PAI dalam memberikan pelatihan tentang model belajar sistem training dengan cara memberikan latihan sebagai tenaga instruktur. Keterampilan sebagai tenaga instruktur atau motivator dengan menggunakan konsep-konsep tertentu yang diciptakannya sendiri. Sebagai contoh intruktur atau motivator pada pembelajaran nilai-nilai kepemimpinan, seperti memahami masalah, merencanakan, merumuskan, mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasinya, dengan cara tertentu. Dalam hal ini dijumpai berbagai model pelatihan yang dikemukakan para ahli. Seperti pernyataan Kepala LPMP Aceh: Dalam pelatihan yang kami lakukan diharapkan para guru PAI lebih profesional

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Aceh dan Peningkatan Mutu Guru Pendidikan Agama Islam

dalam mengembangkan model pembelajaran dan juga kami juga berdiskusi dan berkoordinasi dalam mencari solusi terbaik permasalahan yang ada di dalam organisasi KKG PAI dan MPGP PAI sehingga kedepannya bisa menjadi lebih baik.²¹

Pernyataan Kepala LPMP Aceh ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua KKG PAI Kecamatan Sukamakmur, dimana beliau mengatakan bahwa; Koordinasi dan pembinaan yang dilakukan LPMP Aceh untuk meningkatkan mutu guru Pendidikan Agama Islam yang dilakukan dengan KKG PAI Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar dalam kegiatan pendampingan KKG PAI dengan menanamkan model-model pembelajaran terbaru bagi siswa. Misalnya, model pembelajaran *multi culture* kepada siswa/i untuk menghindari sifat fanatisme dalam jiwa anak-anak dan bisa memperkuat dan memperdalam ilmu kepada anak-anak untuk meningkatkan kualitas belajar mereka.²²

Dari beberapa bentuk koordinasi yang dilakukan oleh LPMP Aceh dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini Kepala Dinas pendidikan dan Kakankemenag, kepala sekolah, dan Ketua KKG dan MGMP PAI mempunyai peran penting dalam memantau peningkatan mutu guru, karena guru merupakan komponen atau unsur pendidikan yang paling utama dibandingkan dengan komponen atau unsur pendidikan lainnya. Seandainya komponen atau unsur pendidikan lainnya tidak ada, seperti tidak ada silabus atau gedung sekolah, namun masih ada guru, maka kegiatan pendidikan akan tetap berjalan.

Sejalan dengan posisi guru yang demikian strategis dalam kegiatan pendidikan, maka upaya peningkatan mutu pendidikan harus dimulai dengan peningkatan mutu guru, sebagaimana yang ditempuh oleh Pemerintah melalui program sertifikasi, pendidikan profesi keguruan dan lain sebagainya, agar menjadi guru yang profesional.

Dalam pendidikan agama Islam, seorang guru yang profesional, bukanlah hanya sekedar memiliki empat kompetensi profesional sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang kompetensi akademik, pedagogik, kepribadian dan sosial, melainkan juga harus memiliki misi kenabian, menjadi contoh dan teladan yang baik, zuhud, ikhlas, pema'af, memiliki sifat penyayang dan kebakapan, senantiasa menambah ilmu, sabar, dan memperhatikan perbedaan bakat dan minat peserta didik.

²¹ Hasil wawancara dengan Kepala LPMP Aceh, Tanggal, 22 Februari 2020.

²² Hasil wawancara dengan Ketua KKG PAI Kecamatan Sukamakmur, Tanggal, 5 Mei 2020.

Guna mencapai sifat-sifat tersebut, dapat ditempuh dengan cara meningkatkan peran LPMP Aceh dalam meningkatkan mutu pendidikan profesi keguruan, memberikan wawasan tentang paradigma baru model pembelajaran (*scientific approach*), pelatihan guru yang mampu menginteraint, motivator, tutor dan instruktur. Memberikan wawasan tentang paradigama baru yang berkaitan dengan berbagai aspek pendidikan, terutama tentang PBM (Proses Belajar Mengajar). Model pembelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran ilmiah (*scientific approach*) pada kurikulum tahun 2013 misalnya harus diberikan. Yaitu model pembelajaran yang mendorong para peserta didik untuk aktif mengambil bagian dalam kegiatan belajar mengajar, dengan cara mengamati (*observasi*), menanya (*questioning*), mengerjakan (*doing*), menganalisa (*analysing*), menyimpulkan (*conlution*), dan menciptakan (*creating*). Untuk berbagai model pembelajaran seperti *active learning*, *cooperative learning*, *contextual teaching learning (CTL)*, *problem based learning (PBL)*, *project based learning (PBL)*, *Quantum Teaching Learning (QTL)*, *Role Playing*, dan sebagainya harus dikuasai baik secara konseptual, maupun praktikal. Untuk itu pada setiap semester, setiap guru diminta membuat sebuah disain pembelajaran dengan menggunakan berbagai model dan pendekatan pembelajaran tersebut di bawah bimbingan seorang tenaga ahli, tutor atau instruktur yang berpengalaman yang ada di LPMP Aceh. Sejalan dengan itu, setiap guru PAI juga dilatih untuk menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada alam (*sekolah alam*), kegiatan outbond, dan sebagainya. Caranya adalah dengan melalui magang pada berbagai kegiatan tersebut, atau dengan cara *learning by doing* (belajar sambil melakukan sesuatu).

D. Penutup

Mengacu pada hasil pembahasan tentang Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Aceh dan peningkatan mutu guru Pendidikan Agama Islam, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Aceh mempunyai peran sebagai organizer dalam pembinaan program sistem penjaminan mutu pendidikan bagi sekolah model, dimana LPMP Aceh memberikan bantuan teknis kepada Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang ada di Aceh dalam pendampingan penjaminan mutu terkait delapan Standar Nasional Pendidikan. LPMP Aceh juga berperan sebagai fasilitator dalam pendidikan dan pelatihan (*diklat*) dalam upaya peningkatan kompetensi Guru PAI melalui pelatihan dan workshop Guru PAI, sesuai dengan

namanya mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi. Serta mempunyai peran sebagai pendamping pendidikan dan pelatihan dalam peningkatan kompetensi Guru PAI yang dilaksanakan oleh widyaiswara PAI melalui pelatihan dan workshop Guru PAI.

2. Adapun bentuk dan koordinasi program peningkatan mutu guru Pendidikan Agama Islam di LPMP Aceh yaitu adanya kerjasama dengan Lembaga/Dinas Pendidikan dalam mensinkronisasikan Program Kemitraan antar Lembaga/instansi Pendidikan yang dapat mempercepat dan mempermudah implementasi program peningkatan mutu pendidikan baik bagi guru mata pelajaran umum maupun guru PAI. Dan adanya kerjasama dengan satuan pendidikan dalam melakukan pembinaan secara berkelanjutan dengan program kegiatan yang ada di LPMP Aceh. Serta kerjasama dengan kelompok guru melalui pendampingan di sekolah yang difasilitasi oleh Widyaiswara PAI dalam peningkatan kompetensi Guru PAI melalui Pelatihan KKG/MGMP dan Workshop Guru PAI.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Tabrani Rusyan. *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994.
- Aan Komariah, Djam'an Satori. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Abdul Hadis dan Nurhayati. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Abu. Ahmadi. Nur, Uhbiyati. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Ace Suryadi dan H. A. R. Tilaar. *Analisis Kebijakan Pendidikan; Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.
- Ace Suryadi., dkk. *Indikator Mutu dan Efisiensi Pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia*, dalam Fasli Jalal dan Dedi Supriyadi (ed.), *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001.
- Achmad Badrudin, “*Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam (studi tentang School Based Management di MTsN Model Padarincang Banten)*”, Skripsi Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Jurusan PAI, tahun 2006.
- Ade Wahidin. Konsep Ulama Menurut Al-Qur‘an (Studi Analitis atas Surat Fathir Ayat 28). *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu AlQur’an dan Tafsir*.

- Afifuddin. *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Ahmad Barizi dan Muhammad Idris. *Menjadi Guru Unggul*. Yogyakarta: AR_RUZZ Media Group, 2009.
- Akmal Hawi. *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Asmadi, *Teknik Prosedural Keperawatan: Konsep Aplikasi Kebutuhan Dasar Klien*. Jakarta: Salemba Medika, 2008.
- Beeby, C. E. *The Quality of Education in Developing Countries*. (Massachusetts: Harvard University Press, 1966).
- Buksi Lumbessy. "Analisis Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SMA Negeri 2 Kota Ternate". *Jurnal Widya Pendidikan*, Volume 7 cet. 15, September 2019.
- C.E Beeby. *Pendidikan di Indonesia*, terj. BP3K dan YIIS. Jakarta: Debdikbud, 1981.
- Cece Wijaya dan Tabrani Rusyan. *Kemampuan Dasar Guru*. Bandung : Remaja Rosda Karya, 1991.
- Coombs, P. H. *The World Crisis and Education*. Oxford: Oxford University Press, 1985.
- Creswell, J. W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.